

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lonca Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi

Analysis of Accountability and Transparency of Village Fund Management in Lonca Village, Kulawi District, Sigi Regency

Sulastri^{1*}, Andi Sabirin Baso², Siti Zuhroh³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu

*Corresponding Author: E-mail: sulastrisulastri14040@gmail.com

ABSTRAK

Sulastri, 221 20 020 menyajikan skripsi dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lonca Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi”. Penyusunan skripsi ini dibimbing oleh Bapak Andi Sabirin Baso selaku dosen pembimbing I dan Ibu Siti Zuhroh selaku dosen pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lonca, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Lonca telah dilaksanakan dengan baik sesuai tahapan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Akuntabilitas ditunjukkan melalui penyusunan laporan yang transparan dan tepat waktu, sedangkan transparansi terlihat dari keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui media informasi desa serta pelibatan masyarakat dalam proses musyawarah. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan tata kelola keuangan desa yang bertanggung jawab dan terbuka.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability and transparency in the management of Village Funds in Lonca Village, Kulawi Subdistrict, Sigi Regency. The research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Informants include the village head, village officials, the Village Consultative Body (BPD), and local community members. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and drawing conclusions. The results indicate that the management of Village Funds in Lonca Village has been carried out properly in accordance with the stages outlined in Ministry of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018, starting from planning, implementation, administration, reporting, to accountability. Accountability is demonstrated through transparent and timely financial reporting, while transparency is evident in the openness of information shared with the public via village information

media and community involvement in village meetings. This reflects that the village government has implemented responsible and transparent financial governance.

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Funds, Village Financial Management*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa memegang peranan krusial dalam pembangunan pedesaan karena dana ini merupakan salah satu instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan untuk mendukung berbagai program yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat (Watupelit, et al, 2022:3).

Melalui pengelolaan yang tepat, dana desa dapat menjadi motor penggerak transformasi sosial dan ekonomi masyarakat desa, memperkecil kesenjangan antara desa dan kota, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Rosyan, et al., 202:4). Pentingnya pengelolaan dana desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-peraturan turunannya, yang menetapkan bahwa dana desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Transparansi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi pengelolaan dana desa dengan menyediakan akses informasi yang terbuka dan mudah dipahami. Dengan adanya transparansi, masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang didanai oleh dana desa. Informasi yang dipublikasikan, seperti anggaran, realisasi, dan hasil pelaksanaan program, memungkinkan masyarakat untuk memantau setiap tahapan penggunaan dana desa (Watupelit, et al., 2022:5). Transparansi juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rosyan, et al., 202:6).

Di sisi lain, akuntabilitas memastikan bahwa aparat desa bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya dalam mengelola dana desa. Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan dan laporan kegiatan yang disusun secara rinci dan disampaikan kepada masyarakat serta pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga pengawas (Attaqy & Khairudin, 2022:3). Akuntabilitas tidak hanya terkait dengan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku tetapi juga mencerminkan komitmen moral untuk menggunakan dana secara bijaksana, efisien, dan efektif (Watupelit, et al., 2022:4).

Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat maksimal dan mendorong kemandirian desa dalam jangka panjang. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan, menjadi prioritas utama karena keberadaannya secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa menemukan beberapa tantangan dan kendala dalam pengelolaan dana desa. Penelitian Watupelit, dkk. (2022) menemukan bahwa aspek partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perencanaan dana desa di desa Noelbaki masih rendah, sehingga pengambilan keputusan sering kali tidak merefleksikan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Penelitian lain, yang dilakukan oleh Attaqy & Khairudin (2022) di Desa Karta Jaya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia aparat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban masih belum optimal. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dan pengelolaan administrasi dana desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rosyan, dkk (2022) di desa Tamanagung menyoroti bahwa meskipun alokasi dana desa meningkat dari tahun ke tahun, realisasi anggaran belum sepenuhnya sejalan dengan prioritas pembangunan. Masih ditemukan infrastruktur yang tidak diperbaiki meskipun menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, kurangnya publikasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat menciptakan kesenjangan pemahaman mengenai penggunaan dana desa.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diindikasikan bahwa, meskipun prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa, sejumlah masalah masih ditemukan. Pelibatan masyarakat sering kali terbatas, sehingga alokasi

dana kurang mencerminkan kebutuhan lokal. Kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan juga masih rendah, menyebabkan keterlambatan dan ketidakakuratan laporan. Selain itu, prioritas alokasi dana desa sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan mendasar, seperti perbaikan infrastruktur atau layanan publik.

Desa Lonca, yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi menghadapi beberapa masalah terkait pengelolaan dana desa. Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari masyarakat setempat, peneliti menemukan bahwa pengelolaan dana desa di desa Lonca belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi. Menurut masyarakat, informasi mengenai kegiatan pengelolaan keuangan desa Lonca yang dipublikasikan sering kali tidak mencantumkan kegiatan yang belum terlaksana atau yang tidak dapat dilaksanakan. Kekurangan ini menyebabkan masyarakat merasa tidak mendapatkan gambaran utuh terkait progres program pembangunan yang direncanakan.

Selain itu, tidak adanya mekanisme pengaduan yang jelas turut menjadi hambatan dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Tanpa saluran pengaduan yang efektif, masyarakat kesulitan untuk menyampaikan masukan, kritik, atau melaporkan potensi penyimpangan. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan mengurangi partisipasi mereka dalam proses pembangunan.

Permasalahan lain yang terjadi di desa Lonca adalah informasi terkait pengelolaan dana desa masih sulit untuk diakses oleh masyarakat. Tidak adanya informasi yang memuat besaran penggunaan dana desa turut menjadi penyebab sulitnya akses masyarakat memperoleh informasi terkait penggunaan dana desa. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka, memberikan akses terhadap masyarakat agar dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran desa.

Disamping hal tersebut, rendahnya pemahaman aparat desa terkait akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat berdampak pada kurang optimalnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, ketidaksesuaian penggunaan dana dengan peraturan yang berlaku, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Mengingat dana desa memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka masalah ini juga memerlukan penelitian mendalam sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Lonca.

Sementara itu, pada tahun 2024, terdapat penurunan signifikan dalam realisasi pendapatan dan belanja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan yang direncanakan sebesar Rp382.825.971,00 hanya terealisasi sebesar Rp304.345.086,00. Selain itu, realisasi belanja juga menunjukkan angka yang jauh lebih rendah dari anggaran yang tersedia. Dari total anggaran belanja sebesar Rp272.025.971,00, hanya terealisasi sebesar Rp110.800.100,00. Belanja tersebut difokuskan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan, sedangkan tidak terdapat alokasi untuk belanja pegawai, barang dan jasa, maupun belanja modal seperti tahun sebelumnya. Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi pada tahun 2024 ini mengindikasikan adanya hambatan dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan program, yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Desa ke depannya.

Berdasarkan uraian *research gap* penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi di Desa Lonca, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lonca Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi”***.

METODE PENELITIAN

Paradigma memiliki arti sebagai sebuah sudut pandang untuk menilai fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar serta pedoman cara bersikap menanggapi fenomena yang terjadi. Menurut salim (2016, hal.118) paradigma diartikan sebagai sebuah rangkaian asumsi dan sebuah keyakinan.

Asumsi inikemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran yang dapat dipercaya, serta kebenarannya dapat dibuktikan secara empirik hingga akhirnya asumsi tersebut bisa divaidasi sebagai *accepted assume to be true*.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *post-positivisme* yang memiliki ciri reduksi data iduktif yang berarti bahwa data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mencari hubungan sebab akibat, tetapi tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya bias atau ketidakpastian dalam hasil penelitian, berdasarkan logika, empiris, serta menelaah secara mendalam mengenai sebab dan akibat (Creswell, 2014:31). Menurut Phillips dan Burbules (Creswell, 2014:36) terdapat beberapa asumsi yang menjadi kunci bagi sebuah paradigma *post-positivisme*, yakni:

1. Kebenaran dari pengetahuan hanya sebuah asumsi yang belum bisa dikatakan mutlak kebenarannya. Pada konteks penelitian, hipotesis yang dimiliki peneliti tidak berfokus untuk dibuktikan kebenarannya, melainkan mencoba mencari kesalahan untuk kemudian menolak atau disandingkan dengan hipotesis yang ada.
2. Melalui penelitian, kita bisa menjadikannya sebuah proses untuk mengklaim suatu asumsi, untuk kemudian asumsi tersebut dikembangkan menjadi sebuah klaim yang lebih kuat dan berdasar.
3. Dalam membuat sebuah penelitian, terdapat aspek kunci yang harus ada, yakni; data, bukti, serta pertimbangan yang rasional. Pada kenyataan di lapangan, untuk mendapatkan informasi atau data, peneliti harus melakukan observasi, kemudian observasi tersebut akan memiliki bukti (rekaman, foto, dsb) yang diharapkan hasil tersebut mampu ditelaah secara rasional untuk kemudian disebut sebagai sebuah pengetahuan.
4. Peneliti berusaha untuk menjelaskan sebab dan akibat dari sebuah proses yang ada, tentunya didukung dengan pernyataan yang relevan untuk dapat diuji.
5. Objektivitas hasil merupakan sebuah keharusan dalam penelitian.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lonca Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Pemilihan lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan adanya fenomena yang dijelaskan pada latar belakang. Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lonca terdapat beberapa permasalahan mengenai akuntabilitas dan transparansi sehingga peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengelolaan dana desa khususnya terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang ada di Desa Lonca Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. Waktu penelitian untuk target seminar proposal direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Januari 2025 hingga bulan April 2025. Setelah itu, akan dilanjutkan pada tahap penelitian hingga tahap sidang skripsi.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Menurut Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian kualitatif data yang akan lebih sering muncul yaitu data berupa kata-kata bukan berbentuk angka. Data tersebut dikumpulkan dengan berbagai cara pengumpulan data, seperti : observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi sesuai keperluan peneliti itu sendiri yang selanjutnya akan

dianalisis secara kualitatif. Segala data yang diperoleh oleh peneliti baiknya agar segera dilakukan analisis data.

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Bogdan & Biklen (dalam Djam'an Satori & Aan Komariah, 2014 ; 201) mengemukakan bahwa analisis data adalah :

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Berdasarkan konsep-konsep yang telah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa analisis data kualitatif ini dipandang sebagai suatu proses. Proses yang dimaksud di sini ialah proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan baik observasi, wawancara, maupun dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang telah diperoleh oleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Data wawancara akan dianalisis dengan langkah-langkah menurut Sugiyono (2011 ; 247) yaitu “Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Lonca Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam tata kelola keuangan desa yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, hukum, dan sosial. Di Desa Lonca, prinsip ini telah diimplementasikan secara menyeluruh dalam lima tahap pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun RKPDes dan APBDes berdasarkan usulan masyarakat yang dikumpulkan melalui Musyawarah Dusun (Musdus), kemudian dibahas secara terbuka dalam Musyawarah Desa (Musdes). Partisipasi aktif masyarakat dan dokumentasi lengkap berupa berita acara, daftar hadir, serta notulen rapat menunjukkan adanya pertanggungjawaban terhadap proses pengambilan keputusan.

Tahap pelaksanaan juga mencerminkan akuntabilitas yang kuat. Kegiatan yang direncanakan dijalankan sesuai dengan dokumen RKPDes dan APBDes. Pemerintah desa membentuk tim pelaksana kegiatan serta tim pengawas dari unsur perangkat desa dan BPD. Mereka secara aktif melakukan pemantauan dan pengecekan langsung ke lapangan. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan memiliki peran signifikan dalam memastikan kegiatan berjalan tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan didukung dengan bukti administrasi.

Dalam tahap penatausahaan, akuntabilitas terlihat dari penggunaan sistem pencatatan ganda yaitu manual dan elektronik. Aplikasi Siskeudes digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara digital, sementara pembukuan manual tetap dijaga untuk mengantisipasi kendala teknis seperti gangguan listrik atau perangkat. Semua bukti transaksi seperti kuitansi, laporan pembelian, dan dokumen lainnya disimpan secara sistematis dan siap untuk diaudit oleh pihak eksternal maupun internal.

Pelaporan menjadi wujud pertanggungjawaban rutin yang dilakukan oleh Kaur Keuangan melalui penyusunan laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan tersebut disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Desa, BPD, dan pemerintah kecamatan. Dalam konteks ini, laporan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana pengendalian internal yang memperkuat akuntabilitas.

Tahap terakhir adalah pertanggungjawaban, yang diwujudkan melalui Musyawarah Pertanggungjawaban Akhir Tahun. Dalam forum ini, pemerintah desa menyampaikan realisasi fisik dan keuangan dari seluruh kegiatan yang telah dijalankan. Seluruh warga diundang untuk menghadiri musyawarah, diberi ruang untuk bertanya dan memberikan evaluasi. Hal ini

menunjukkan bahwa akuntabilitas di Desa Lonca tidak berhenti pada aspek teknis, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Lonca telah berjalan dengan sangat baik. Pemerintah desa tidak hanya mematuhi prosedur administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab atas penggunaan dana publik. Ini menjadi indikator penting dalam menciptakan kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Watupelit et al. (2022) yang menyatakan bahwa meskipun masih ada kendala administratif, penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa mampu mendorong pembangunan dan partisipasi masyarakat. Sama halnya dengan penelitian Attaqy & Khairudin (2022) di Desa Karta Jaya yang menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dan pelaporan rutin menjadi bentuk akuntabilitas yang nyata dalam pengelolaan Dana Desa. Lebih lanjut, penelitian Pah et al. (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan telah dilaksanakan dengan baik, namun aspek administratif masih perlu dibenahi.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Lonca Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi menjadi penting agar masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki akses terhadap informasi yang relevan dan dapat berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Di Desa Lonca, transparansi telah menjadi bagian integral dari pengelolaan Dana Desa sejak tahap awal. Pada tahap perencanaan, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan dalam Musdes dan Musdes, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan turut menentukan prioritas pembangunan desa. Selain itu, hasil perencanaan dipublikasikan melalui media informasi desa seperti papan pengumuman dan baliho, sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana penggunaan anggaran dengan jelas.

Tahap pelaksanaan juga dilaksanakan secara transparan. Informasi terkait jadwal pelaksanaan kegiatan, jenis program yang dijalankan, serta siapa yang terlibat, disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung melalui kepala dusun, maupun diumumkan di tempat ibadah seperti gereja. Hal ini memungkinkan masyarakat mengetahui proses pembangunan dan ikut mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, peluang untuk penyimpangan dapat ditekan karena adanya kontrol sosial dari warga.

Pada tahap penatausahaan, transparansi terlihat dari pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan dengan sistem aplikasi resmi yaitu Siskeudes, yang memungkinkan pencatatan data secara real-time dan akurat. Selain itu, semua dokumen pendukung seperti kuitansi, foto kegiatan, daftar hadir, dan laporan realisasi disusun dan disimpan secara sistematis. BPD sebagai lembaga pengawas diberikan akses untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian data.

Pelaporan keuangan disusun dan disampaikan secara berkala kepada masyarakat dalam bentuk ringkasan laporan yang dipasang di papan pengumuman desa. Selain itu, laporan juga dipresentasikan dalam pertemuan warga sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penggunaan anggaran. Informasi yang disajikan meliputi realisasi fisik kegiatan dan anggaran yang digunakan, yang memperkuat prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik.

Dalam tahap pertanggungjawaban, transparansi menjadi sangat nyata ketika pemerintah desa menyelenggarakan Musyawarah Pertanggungjawaban Akhir Tahun. Musyawarah ini bersifat terbuka dan memberikan ruang bagi warga untuk menilai, bertanya, dan memberikan saran terhadap pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga disampaikan secara tertulis kepada BPD dan masyarakat.

Dengan demikian, transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Lonca telah dilaksanakan dengan komprehensif dan konsisten. Keterbukaan informasi, akses publik terhadap data keuangan, serta pelibatan masyarakat dalam proses musyawarah menjadi bukti nyata bahwa pemerintah desa menjalankan prinsip good governance. Transparansi ini menjadi dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan masyarakat, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa Dana Desa digunakan tepat sasaran untuk kesejahteraan warga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rosyan et al. (2022) yang menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa, meskipun masih terkendala kurangnya publikasi informasi. Penelitian ini juga diperkuat oleh Attaqy & Khairudin (2022) yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dan pelaporan terbuka menjadi bentuk nyata transparansi di Desa Karta Jaya. Begitu pula dengan Pah et al. (2023) yang menyatakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa telah berjalan transparan, meskipun aspek administratif masih perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Lonca telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Setiap tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, partisipatif, serta dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti pertanggungjawaban yang tertib. Partisipasi masyarakat, pengawasan oleh BPD, serta penggunaan sistem digital (Siskeudes) turut memperkuat akuntabilitas tersebut.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Lonca juga telah diwujudkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa membuka akses informasi kepada masyarakat melalui musyawarah terbuka, papan informasi, dan penyampaian laporan secara langsung. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan serta kemudahan akses terhadap informasi dana desa membuktikan komitmen Desa Lonca terhadap prinsip transparansi.

SARAN

Pemerintah Desa Lonca perlu mengadakan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala kepada perangkat desa, khususnya terkait penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Pemerintah desa sebaiknya memperluas media informasi publik, tidak hanya melalui papan pengumuman desa, tetapi juga memanfaatkan media digital seperti website atau media sosial desa yang mudah diakses oleh masyarakat. Penyampaian informasi mengenai seluruh tahapan pengelolaan dana desa, termasuk kegiatan yang belum terlaksana, harus dijelaskan secara terbuka untuk memperkuat transparansi dan membangun kepercayaan publik.

Pemerintah Desa Lonca disarankan membentuk sistem atau saluran pengaduan masyarakat yang jelas, mudah diakses, dan responsif, seperti kotak saran di balai desa atau nomor pengaduan resmi. Hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap pelaksanaan program dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah & Djam'an Satori. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrianto, N. (2007). *Good e-Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Attaqy, F., & Khairudin, K. (2022). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karta Jaya*. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1793-1800.
- Bagong, Suyanto .(2005). *Metode Penelitian Sosial*. *Jakarta : Kencana Prenanda Media Group*.
Bouma, Gary D. 1
- Creswell, John W.(2014) *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches Fourth Edition*. London: City Road , SAGE Publications Ltd.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor publik*. Yogyakarta : Andi
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Nasirah. (2016). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*. *Akuntansi, Universitas Muhammdiyah Malang*.
- Pah, V. C., Maong, A., Correia, M. F. M., Besi, A., Seran, B. L., & Tasuab, R. A. (2023). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang*. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 2(9), 11-20.
- Presiden Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah.
- Rosyan, A. N., Rahman, A. Z., & Kismartini, K. (2022). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 37-48.
- Salim Agus. (2016). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Ulum, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMMPRESS

Watupelit, R. K. D., Perseveranda, M. E., Bibiana, R. P., Man, S., & Manafe, H. A. (2022). *Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa noelbaki, kupang tengah, kabupaten*